



Program Pamsimas 2019

Masih Proses Penentuan Desa Penerima

Tabanan (Bali Post) -

Tabanan mendapatkan bantuan program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) sejak tahun 2014. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi. Pada tahun 2019 Tabanan kembali memperoleh program ini. Saat ini sedang dalam proses peninjauan untuk menentukan desa mana saja yang memenuhi syarat mendapatkan program ini.

Kepala Bappelitbang Tabanan yang juga Sekretaris Pokja Sanitasi dan Air Minum I.B. Wiratmaja, Kamis (17/5) kemarin, mengatakan program Pamsimas di Tingkat Nasional telah dilaksanakan melalui program Pamsimas I dan II, dan dilanjutkan melalui program Pamsimas III. Dalam pelaksanaan program Pamsimas III tahun 2017-2018 Kabupaten Ta-

banan mengikuti program ini bersama-sama dengan empat kabupaten lainnya di Bali. Saat itu jumlah desa penerima program sebanyak 25 desa di lima kecamatan dengan jumlah dana sebesar Rp 8.750.145.750, yang terdiri atas Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari dana APBN, dana APBD Kabupaten Tabanan, APBDes, *in cash* dan *in kind* masyarakat.

Wiratmaja melanjutkan, dari tahun 2014 hingga 2018 jumlah desa yang telah mendapatkan program Pamsimas sebanyak 45 desa di sembilan kecamatan dengan kondisi infrastruktur

berfungsi baik. Dari 45 desa tersebut, 19 desa sudah mencapai akses 100 persen air minum, 15 desa sudah mencapai akses 100 persen sanitasi, 10 desa sudah mencapai akses air minum dan sanitasi 100 persen. Kabupaten

Tabanan ditetapkan sebagai Kabupaten Pamsimas Terbaik Nasional yang diperoleh oleh Desa Munduktemu.

Agar program pamsimas kembali sukses, sosialisasi Program Pamsimas III tahun 2019 akan segera dilakukan. Tujuannya adalah untuk menjangkau desa sasaran program Pamsimas 2019. "Sesuai dengan arahan dan target pusat diharapkan tahapan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) adalah pada Oktober 2018. Maka kabupaten Tabanan diharapkan sudah melakukan sosialisasi pada bulan Mei 2018," ujar Wiratmaja.

Secara umum kriteria desa sasaran Pamsimas adalah desa yang cakupan akses air minum aman dan sanitasi aman masih rendah. Selain itu, prevalensi penyakit diare atau penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan tergolong tinggi berdasarkan data puskesmas. Dalam pelaksanaannya Pamsimas dikelola oleh desa, di mana setiap sambungan rumah tangga memiliki meteran air seperti layanan PDAM. Masyarakat membayar kepada pengelola untuk pemakaian air sesuai dengan yang digunakan. Hasil dari Pamsimas ini akan masuk ke kas desa. Jadi program Pamsimas selain untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di perdesaan, juga sebagai pemasukan untuk desa. (kmb24)



I.B Wiratmaja

Bali Post/san

Edisi : Jumat, 18 Mei 2018

Hal : 7



Pantau Proyek, Pjs. Bupati Temukan Pengerjaan Belum Maksimal



PANTAU - Pjs. Bupati Klungkung I Wayan Sugiada bersama OPD terkait memantau proyek penataan Lapangan Puputan Klungkung, Selasa (15/5) kemarin.

TIGA proyek yang digulirkan Pemkab Klungkung tahun ini dipantau Pejabat Sementara Bupati I Wayan Sugiada, Selasa (15/5) kemarin. Hasilnya, ditemukan pengerjaan yang belum maksimal. Mengantisipasi itu, instansi terkait diminta untuk meningkatkan pengawasan.

Pantauan tersebut diawali di Lapangan Puputan Klungkung. Anggaran penataannya mencapai Rp 2,3 miliar. Sugiada menyoroti arena *skateboard* yang sudah selesai dikerjakan. Pasalnya, kualitasnya kurang memuaskan. Air hujan masih ditemukan menggenang. Sementara untuk pembangunan lain, tidak ditemukan persoalan berarti. "Lapangan ini fungsinya untuk jangka panjang. Jadinya pembangunan harus diperhatikan. Untuk genangan air, bisa membuat cepat rusak. Ini sudah diminta untuk segera memperbaiki," tegasnya.

Proyek yang pembangunannya dianggarkan Rp 1,3 miliar ini, pengelolaan rencananya akan diserahkan ke Desa Adat Pesinggahan. "Untuk

Mendapat pernyataan tersebut, *project manager* CV Okane sebagai pelaksana mengaku siap menindaklanjuti. "Untuk *skateboard* masih uji coba. Itu akan diratakan lagi. Ada alatnya," sebutnya. Proyek yang di-*deadline* 4 Juli ini sudah tuntas 75 persen. Pihaknya terus melakukan percepatan. "Kami optimis bisa selesai sesuai jadwal," imbuhnya.

Pemantauan yang diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berlanjut ke proyek pembangunan Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Klungkung. Proyek yang peletakan batu pertamanya berlangsung April ini baru berjalan tiga persen. Mengingat harus selesai pada akhir Desember, pelaksana diminta untuk menambah tenaga kerja. "Ini bangunan tiga lantai. Sekarang tenaganya ada 60 orang. Tadi sudah saya minta ditambah

mengantisipasi pembangunan yang kurang maksimal, kami minta pengawasan dari instansi terkait ditingkatkan lagi," pungkasnya. (ad834)

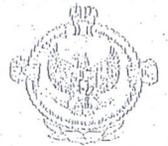
lagi 30. Supaya cepat selesai," ungkap Sugiada.

Pejabat asal Tabanan ini juga menemukan pemasangan gambaran bangunan yang dianggarkan Rp 18,5 miliar ini masih tersembunyi. Pelaksana sudah diminta untuk memindahkan ke tempat lebih representatif. "Gambar ini jadi acuan tenaga untuk bekerja. Harus terpasang di luar. Bukan di dalam," tegasnya.

Pemantauan terakhir berlangsung di Rest Area Pantai Goa Lawah, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan. Perhatiannya tidak hanya tertuju pada kualitas fisik, namun juga taman. "Pemasangan batu sikat ada yang kurang bagus. Taman juga kurang bagus. Tanamannya banyak mati. Ini harus segera ditangani. Toilet juga belum ada. Semoga di anggaran perubahan bisa terpasang untuk pembangunan," katanya. Ob-

Edisi : Rabu, 16 Mei 2018

Hal : 12



Defisit Anggaran, Belanja Wajib Jangan Dipangkas

Gianyar (Bali Post) -

Kalangan DPRD Gianyar menyoroti defisit anggaran di eksekutif. Pasalnya, defisit anggaran ini nilainya mencapai Rp 114 miliar lebih. Ketua Komisi II DPRD Gianyar I.B. Nyoman Rai, Minggu (13/5) kemarin mengungkapkan, terkait kondisi ini, Pemkab Gianyar harus melakukan rasionalisasi. Namun dia mengingatkan, pemangkasan anggaran tidak menyentuh belanja wajib seperti pendidikan dan kesehatan.

Pria yang akrab disapa Gus Rai ini menjelaskan, Silpa 2017 yang dipasang di APBD 2018 sebesar Rp 200.972.426.094. Namun yang terealisasi hanya Rp 113.705.031.683 sehingga terjadi kekurangan anggaran Rp 87.267.394.411. Jika kekurangan itu ditambah Silpa pengikat pada 2018 sebesar Rp 26.940.658.017, maka total defisit Silpa sebesar Rp 114.208.052.428. "Kekurangan anggaran sebesar Rp 114 miliar lebih ini sudah menjadi temuan BPK," imbuhnya.

Akibat kondisi tersebut, pos belanja otomatis harus dikurangi sebesar Rp 114 miliar lebih. Rasionalisasi anggaran pun menjadi solusi. Sebab opsi lain seperti menjual aset atau mengambil pinjaman, kata Gus Rai, sudah tidak memungkinkan. "Itu tidak memungkinkan karena prosesnya panjang. Solusinya hanya rasionalisasi," ucapnya.

Lebih lanjut Gus Rai mengingatkan eksekutif agar lebih cermat dalam melakukan rasionalisasi anggaran. Jangan sampai belanja wajib yang terkait langsung dengan masyarakat justru dipangkas. "Belanja urusan wajib itu jangan sampai dipotong karena ini langsung berhubungan dengan keperluan masyarakat. Misal, untuk pendidikan dan kesehatan," katanya.

Gus Rai juga meminta anggaran yang dialokasikan untuk hak pegawai jangan dipotong, demikian pula anggaran yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. "Untuk pegawai, infrastruktur dan anggaran untuk pura, itu jangan sampai kena rasionalisasi," tegasnya. Menurut Gus Rai, pos belanja daerah yang bisa dipotong adalah belanja barang dan jasa yang nilainya membengkak. (kmb35)

Edisi : Senin, 14 Mei 2018

Hal : 9



Pemkab Karangasem Diminta Selesaikan Tiga Proyek Macet

KABUPATEN Karangasem sempat mencuri perhatian dengan banyaknya dana pusat yang turun ke Karangasem. Saat itu masyarakat optimis Karangasem berkembang jauh lebih baik dari daerah lainnya lantaran akan terbangunnya beberapa megaprojek. Pada masa itu ada tiga proyek macet yang mendesak, namun segera dituntaskan. Sekarang ini Pemkab Karangasem diminta mampu menyelesaikannya dengan melakukan komunikasi yang intens dengan pemerintah pusat. Bagaimanakah janji-janji dari dewan dan juga pejabat eksekutif tentang harapan tersebut?

Tiga proyek besar tersebut yakni proyek air bersih pipa Telaga Waja, pembangunan Dermaga Cruise Tanah Ampo, dan Pasar Seni Manggis. Selain itu ada juga rencana proyek akses Jalan Prof. Ida Bagus Mantra menuju Karangasem tembus hingga ke Buleleng.

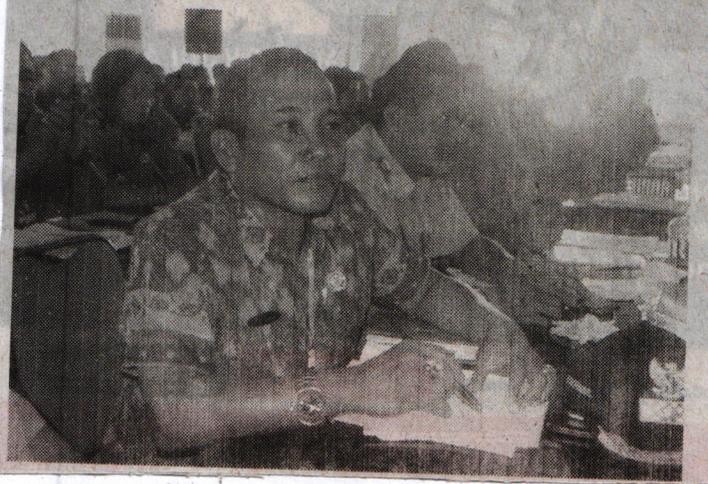
Tokoh masyarakat, Gede Intaran, mengharapkan

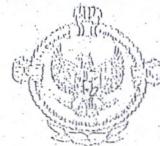
tiga proyek besar ini sebenarnya menjadi fondasi kuat perkembangan Karangasem ke depannya. Pemkab Karangasem dalam hal ini harus mampu mendorong penyelesaian proyek air Telaga Waja itu agar bisa dinikmati oleh semua warga Karangasem, khususnya wilayah Abang dan Kubu. Demikian juga untuk proyek Dermaga Cruise

Tanah Ampo, yang sudah dirintis susah payah oleh pemerintahan sebelumnya, juga harus bisa beroperasi nantinya.

"Pelabuhan *cruise* itu agar bisa menarik kapal *cruise*. Bukan seperti saat ini hanya mengundang pemancing. Tolong selesaikan itu," pinta Gede Intaran, Perbekel Kesimpur, saat *workshop* evaluasi implementasi sistem tata kelola keuangan desa dengan aplikasi *siskeudes* di Aula Disdikpora, belum lama ini.

Sebelumnya, Dirjen Kementerian Perhubungan Wahyu Satrio Utomo sempat





Sambungan

datang ke Pelabuhan Tanah Ampo. Kedatangannya untuk mengecek proyek *Jetty Ramdor* dan *Break Water* senilai Rp 49 miliar. Saat itu proyek tersebut dalam tahap perpanjangan selama 90 hari, karena pengerjaan sebelumnya tidak mencapai target pada 15 Desember 2017. "Setelah tahap perpanjangan selesai, akan dilanjutkan pembangunan tahap II. Tendernya mulai Juni 2018, dengan total anggaran tahap II senilai Rp 48 miliar," katanya.

Gede Intaran berharap apa yang sudah terbangun, dapat dilanjutkan dan di-

selesaikan. Sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap perkembangan masyarakat Karangasem. Termasuk rencana kelanjutan pembangunan Jalan Prof. Ida Bagus Mantra hingga ke Karangasem. Menurutnya, ini adalah rencana-rencana strategis daerah yang meski dituntaskan, demi kemajuan wilayah timur, khususnya Karangasem. "Kalau ini benar bisa tembus sampai ke Buleleng, maka akan sangat bagus sekali," tegas mantan anggota DPRD Karangasem ini.

Anggota DPR-RI Dapil Bali

dari Komisi XI Tutik Kusuma Wardhani yang hadir pada saat itu mengaku siap mengawal aspirasi warga Karangasem dari kalangan perbekel ke pusat. Meski Komisi XI itu membidangi keuangan dan perbankan, dia mengatakan akan melanjutkan aspirasi itu kepada komisi yang membidangi di DPR-RI.

Khusus masalah pipa air Telaga Waja itu, Sekda Karangasem Gede Adnya Mulyadi sempat memberikan tanggapan. Saat ini mega-proyek ini masih bermasalah pada infrastruktur jaringan pipa. Salah satunya pipa yang

melintang di galian C Butus. Jaringan pipa yang menuju ke Kubu itu bermasalah. Hal itu membuat air tidak bisa mengalir ke Kubu. Dia mengakui sudah membahas ini dengan pihak terkait di pemerintah daerah, sebelum melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Apakah pipanya bisa dialihkan melalui jalur lain.

"Kami sudah bergerak membuat terobosan untuk penyelesaian masalah ini. Kami sudah bahas dengan pihak balai. Semua masih proses. Kami berharap warga tetap bersabar," ujarnya. (gik)